

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Bagi perekonomian Indonesia, koperasi merupakan bentuk gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan dan sebagai salah satu penopang perekonomian negara dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Kehadiran koperasi diharapkan mampu mendorong potensi masyarakat untuk terus mengembangkan sector produktifnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Selain itu juga, koperasi berperan sebagai salah satu fasilitator dan juga pendamping bagi masyarakat dalam melaksanakan usaha-usahanya, misalnya melalui bantuan modal, manajemen, pemasaran, dan bantuan lainnya. Koperasi bersama dengan masyarakat berusaha untuk mewujudkan peningkatan perekonomian nasional, memperkokoh perekonomian rakyat, dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia. Berdasarkan No. 17 Tahun 2012, koperasi adalah badan hukum yang di dirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi (Anggun Sabella, 2016).

Menurut Merlyana (2018), koperasi memiliki kekuatan diantaranya: (1) Adanya keterlibatan anggota dalam koperasi yang dapat ditunjukkan dalam bentuk partisipasi anggota yang merupakan aktivitas yang mendorong kreativitas anggota; (2) Adanya

keseimbangan pemanfaatan hak dan penekanan kewajiban yang dilakukan seluruh anggota karena koperasi milik semua anggota dan menjadi tanggungjawab bersama; (3) Koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki kepentingan bersama sehingga akan muncul dukungan dalam bentuk partisipasi dan lain sebagainya. Namun disisi lain, koperasi juga memiliki kelemahan seperti: (1) meskipun secara konstitusional koperasi cukup mendapat tempat dan kedudukan yang penting dalam perekonomian Indonesia, namun keinginan masyarakat untuk menjadi anggota koperasi masih rendah; (2) koperasi juga sering diidentikkan dengan standar hidup yang rendah karena sebagian besar anggota berasal dari kalangan menengah ke bawah; (3) Di koperasi seringkali ditemukan kasus-kasus penyelewengan dan penyimpangan pengelolaan koperasi yang akhirnya membuat masyarakat menjadi antipasti terhadap gerakan koperasi; (4) Sedikitnya dukungan atau keberpihakan pemerintah dan lembaga keuangan untuk memajukan koperasi dibandingkan dengan dukungan yang diberikan kepada bentuk badan usaha lain.

Semakin berkembangnya kegiatan usaha koperasi, tuntutan agar pengelolaan koperasi dilaksanakan secara profesional juga semakin besar. Pengelolaan yang profesional memerlukan adanya sistem pertanggungjawaban yang baik dan informasi yang relevan serta dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan perencanaan dan pengendalian koperasi. Salah satu upaya tersebut adalah pengembangan sistem informasi yang diperlukan untuk menumbuhkan koperasi melalui akuntansi, khususnya merumuskan standar akuntansi keuangan untuk koperasi dalam penyusunan laporan keuangannya (Prastiwi, 2018).

Sebagai komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas koperasi, sistem pelaporan keuangan koperasi mulai disesuaikan dengan laporan keuangan IFRS. Kementerian Koperasi dan UKM memberlakukan penggunaan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sebagai pedoman akuntansi yang baru bagi koperasi maupun UKM sejak PSAK Nomor 27 untuk Koperasi secara resmi dinyatakan tidak berlaku lagi. SAK ETAP merupakan standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK Umum (Prastiwi, 2018).

Berdasarkan SAK ETAP, laporan keuangan lengkap meliputi: (a) neraca, (b) laporan laba rugi, (c) laporan perubahan ekuitas, (d) laporan arus kas, (e) catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan lengkap berarti bahwa suatu entitas harus menyajikan minimum dua periode dari setiap laporan keuangan yang disyaratkan dan catatan atas laporan keuangan yang terkait (IAI, 2013). Laporan keuangan koperasi selain merupakan bagian dari sistem pelaporan koperasi, juga merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus tentang tata kehidupan koperasi sehingga dalam penyusunan laporan keuangannya, koperasi juga harus memperhatikan standar yang digunakan.

Selain itu, adanya pajak ganda pada laporan keuangan tahun 2015 sedangkan pada laporan keuangan 2016 tidak terdapat pajak yang dibayarkan serta informasi dalam catatan atas laporan keuangan KSP CU Dharma Prima Kita sangat minim padahal dalam SAK ETAP disebutkan bahwa Catatan atas laporan keuangan harus: (a) menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan; (b) mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK ETAP

tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan; dan (c) memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini diangkat judul “**Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ( Sak Etap ) Pada Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Credit Union (Ksp CU) “Dharma Prima Kita ”**

## **B. Perumusan Masalah Penelitian**

Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penyusunan laporan keuangan pada Koperasi Dharma Prima Kita?
2. Apakah penyusunan laporan keuangan pada Koperasi Dharma Prima Kita sudah sesuai dengan SAK-ETAP ?

## **C. Batasan Masalah**

Penulis akan membatasi masalah yang akan dibahas, masalah yang akan dibahas hanya berdasarkan pada laporan keuangan yang disusun oleh koperasi pada tahun 2017 dan 2018

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka peneliti menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penyusunan laporan keuangan pada Koperasi Dharma Prima Kita
2. Untuk mengetahui apakah penyusunan laporan keuangan pada Koperasi Dharma Prima Kita sudah sesuai dengan SAK-ETAP yang berlaku.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang dapat diambil, antara lain :

1. Teoritis
  - a. Membuktikan penerapan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik pada Koperasi Dharma Prima Kita.
  - b. Membuktikan kesesuaian antara teori-teori yang ada dengan praktik yang sesungguhnya terjadi.
2. Praktis
  - a. Dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi penelitian lebih lanjut khususnya pada bidang akuntansi keuangan.
  - b. Dapat digunakan sebagai acuan bagi jenis usaha yang sejenis dalam menyusun laporan keuangan berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

## **F. Kerangka Penulis Skripsi**

Penulisan skripsi ini terdiri dalam lima bab, dimana tiap-tiap bab akan disusun secara sistematis sehingga menggambarkan hubungan antara satu bab dengan bab lainnya, antara lain:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang merupakan kerangka penulisan skripsi secara keseluruhan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini menyajikan beberapa teori yang relevan dengan topik skripsi yang akan dijadikan landasan dalam penulisan skripsi ini sehingga mendukung proses penulisan skripsi.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis yang di dalamnya membahas mengenai ruang lingkup penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini membahas secara singkat mengenai gambaran umum objek penelitian, mengurai elemen SAK ETAP yang berkaitan dengan objek penelitian, menjelaskan penyusunan laporan keuangan berbasis SAK ETAP menggunakan sistem akuntansi sederhana dan membahas kendala yang dihadapi objek penelitian dalam menyusun laporan keuangan.

## BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan menyajikan kesimpulan dan memberikan sejumlah saran guna membantu meningkatkan proses bisnis objek penelitian agar lebih efektif.